

BARANG MILIK DAERAH
2018

PERDA NO. 5, LD NO.5, TLD NO. 55

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 84 Tahun 2014, PERMENDAGRI 19 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah .

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 25 Mei 2018

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- tata cara pelaksanaan tender diatur dalam Peraturan Bupati.
- tata cara penetapan formula tarif/besaran sewa diatur dalam peraturan Bupati
- cara pelaksanaan sewa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan pinjam pakai pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- kontribusi tetap dan pembagian keuntungan diatur dalam peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan KSP pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan KSP pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan mengenai Pemilihan Tender diatur dalam peraturan Bupati.
- Ketentuan pengaturan mengenai kontribusi tahunan, hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah, penghitungan dan pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dan pengguna barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan mengenai tata cara KSPI atas barang milik daerah pada pengelola barang dan pengguna barang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Tata cara perhitungan denda diatur dalam peraturan Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah

BARANG MILIK DAERAH
2018

PERDA NO. 5, LD NO.5, TLD NO. 55

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 UUD 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 84 Tahun 2014, PERMENDAGRI 19 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah .

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 25 Mei 2018

- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- tata cara pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- tata cara pelaksanaan tender diatur dalam Peraturan Bupati.
- tata cara penetapan formula tarif/besaran sewa diatur dalam peraturan Bupati
- cara pelaksanaan sewa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan pinjam pakai pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- kontribusi tetap dan pembagian keuntungan diatur dalam peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan KSP pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- cara pelaksanaan KSP pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan mengenai Pemilihan Tender diatur dalam peraturan Bupati.
- Ketentuan pengaturan mengenai kontribusi tahunan, hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah, penghitungan dan pembayarannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dan pengguna barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan mengenai tata cara KSPI atas barang milik daerah pada pengelola barang dan pengguna barang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Tata cara perhitungan denda diatur dalam peraturan Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengamanan barang milik daerah